

## **Konsep dan Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Pendidikan Dasar Islam**

**Muhammad Zulkarnaen**\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

\**Mzulkarnaen1926fai@umbjm.ac.id*

**Abstract** This paper discusses the concepts and values of multiculturalism in Islamic basic education and how it is relevant to Islamic basic education itself. Multiculturalism is a relatively recent concept in the realm of science, especially in the social sciences, so that the multicultural concept is very important to be introduced and entered into the realm of education, especially Islamic basic education which manages multicultural values both from within to grow. awareness of the importance of difference and equality of justice. The multicultural concept has noble values such as justice, tolerance, human rights, justice and gender equality.

**Abstrak** Tulisan ini membahas tentang konsep dan nilai-nilai multikulturalime dalam pendidikan dasar Islam dan bagaimana relevansinya terhadap pendidikan dasar islam itu sendiri. Multikulturalisme merupakan suatu konsep yang relatif paling anyar dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial, sehingga konsep multikultural sangat penting untuk dikenalkan dan masuk dalam ranah pendidikan, terutama pendidikan dasar islam sebagaimana nilai-nilai multikultural sebaiknya diajarkan sedari diri untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perbedaan dan kesetaraan keadilan. Konsep multikultural memiliki nilai-nilai yang luhur seperti keadilan, toleransi, ham, keadilan dan kesetaraan gender

**Kata Kunci:** Multikulturalisme, Nilai-Nilai Multikulturalisme, dan Pendidikan Dasar Islam

### **A. Pendahuluan**

Islam telah menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah hal yang pasti di muka bumi ini, oleh sebab itu hendaknya perbedaan disikapi dengan dewasa dan saling menghargai. Indonesia sebagai negara yang memiliki suku, agama, ras paling majemuk memiliki potensi yang bagus untuk dijadikan role model sebagai negara percontohan dalam membina kerukunan hidup manusia. Dasar negara Pancasila sebagai pondasi yang sarat dengan nilai-nilai substantif Islam ini

menurut Abdul Karim dan di dalamnya memiliki koherensi antar sila satu sama lain menunjukkan bahwa nilai-nilai multikultural dalam Pancasila itu sendiri adalah berlandaskan Islam.<sup>1</sup> Serta yang tidak dapat dilepas dalam pendidikan masa depan menurut Zamroni adalah nilai-nilai budaya yang dapat dimanfaatkan dalam praktek pendidikan.<sup>2</sup> Ini menunjukkan bahwa integrasi keilmuan tidak boleh tercabut dari akan bangsa itu sendiri, sehingga Pendidikan agama Islam mampu mengakomodir perkembangan dan memeberikan solusi terhadap permasalahan multikultural.

## **B. Konsep Pendidikan Dasar Islam Berwawasan Multikultural**

Sangkot Sirait memaparkan ada empat landasan normatif pendidikan Islam multikultural, isu ini dianggap pokok dalam pendidikan Islam multikultural khususnya dalam bidang keagamaan, yaitu:

- a. Kesatuan dalam aspek ketuhanan dan Pesan-Nya (wahyu);
- b. Kesatuan kenabian;
- c. Tidak ada paksaan dalam beragama; dan
- d. Pengakuan terhadap eksistensi agama lain.<sup>3</sup>

Pendidikan Islam multikultural bukan hanya secara konseptual memberikan kesamaan hak atas peserta didik dalam kelas untuk mendapatkan kesempatan di bidang apa saja, tetapi juga penting adalah menjelaskan kepada peserta didik bagaimana Islam membina hubungan yang baik dengan penganut tradisi di luar Islam yang pernah dibawa Nabi Muhammad saw beberapa abad silam. Pendidikan Islam multikultural soyogiayanya menjadi dasar-dasar normatif sebagai landasan untuk merumuskan bagaimana semestinya proses pendidikan dalam Islam dikelola sehingga tidak asing bagi masyarakat yang secara alamiah punya budaya sendiri-sendiri.<sup>4</sup>

Pluralisme agama-agama bukanlah sinkretisme agama, menurut Nurcholis Madjid hakikat dari pluralisme agama adalah menghargai dan menghormati perbedaan. Memperkuat identitas agama masing-masing justru akan makin menegaskan pluralitas agama dan mengamfirmasi nilai-nilai dan arti pluralisme itu sendiri.<sup>5</sup> Ini seyogyanya menjadi inspirasi bagi semua yang sudah dan hendak bergiat dalam wilayah pluralisme agama bukan meninggalkan yang satu (agama

---

<sup>1</sup> Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Surya Raya, 2004), hlm. 48.

<sup>2</sup> Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), hlm. 88.

<sup>3</sup> Sangkot Sirait, "Landasan Normatif Pendidikan Islam Multikultural", dalam *Antologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2010), hlm. 167.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>5</sup> Aris Angwarmase, "Mencarai Landasar Pluralisme," dalam *Prospek Pluralisme Agama* (Yogyakarta: Interfidie, 2009), hlm. 18.

dan ajaran-ajarannya) untuk mendapatkan yang lain (dialog), yang harus terjadi adalah agama masing-masing mengaliri dan menginspirasi perjumpaan-perjumpaan dan dialog-dialog yang terbangun.

Menurut Munir Mulkan guru dan pendidikan agama harus menyadari posisinya dalam keseluruhan sistem dan proses pembelajaran di sekolah umum dan madrasah. Tanpa peluang mengubah dan mengembangkan epistemologi baru dari keseluruhan bidang studi dan praktik pembelajaran agama membuat peserta didik mengalami keterbelahan psikologis atau teologis. Pendidikan multikultural mengadaikan sekolah dan kelas dikelola sebagai sebuah simulasi arena hidup nyata yang plural, terus berubah dan berkembang. Institusi sekolah dan kelas adalah wahana hidup dengan pemeran utama peserta didik di saat guru dan seluruh tenaga kependidikan berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran dikelola sebagai dialog dan pengayaan dan pengalaman hidup yang unik, sehingga bisa tumbuh pengalaman dan kesadaran kolektif setiap warga dan peserta didik yang kelak menjadi dasar etika politik berbasis etika kewargaan.<sup>6</sup>

### C. Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Pendidikan Dasar Islam

Menurut Amin Abdullah dalam Ainul Yaqin setiap agama di dunia memiliki nilai-nilai khas (*typical values*) yang hanya terdapat pada masing-masing agama. Nilai ini diistilahkan dengan nilai partikular. Selain itu setiap agama juga memiliki nilai-nilai umum yang dipercaya oleh semua agama, inilah yang disebut dengan nilai universal.<sup>7</sup> Wacana multikulturalisme sebenarnya tidak berpretansi menghilangkan nilai-nilai partikular dari agama kerana upaya seperti itu merupakan hal yang *impossible*.<sup>8</sup> Wacana ini hanya berupaya agar nilai partikular ini agar nilai-nilai partikular ini tetap berada dalam *exclusive locus*. Sekedar berada dalam wilayah komunitas yang mempercayai nilai partikular itu saja, sedangkan bagi masyarakat luar yang tidak meyakini nilai partikular tersebut, maka yang diberlakukan adalah nilai-nilai universal.<sup>9</sup>

Pendek kata, partikularitas nilai dari suatu agama lebih-lebih lagi partikularitas ritual-ritual agama hanya diperuntukkan bagi intern pemeluk agama lain. Dalam menghadapi pemeluk agama yang berebda menurut Amin Abdullah yang harus dipegang adalah nilai-nilai universal berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, berbuat baik terhadap sesama, kejujuran, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Berdasarkan ini menurut Ainul Yaqin maka keberadaan pendidikan multikultural sangat diperlukan. Pendidikan multikultural adalah strategi

---

<sup>6</sup> Mahfud, *Pendidikan*, hlm. 270.

<sup>7</sup> Yaqin, *Pendidikan*, hlm. xiv.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. xiv.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan menggunakan perbedaan kultural yang berada pada diri peserta didik seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Lanjut Yaqin pendidikan multikultural juga untuk melatih dan menanamkan nilai-nilai yang membangun karakter peserta didik agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka.<sup>11</sup>

### 1. Nilai Demokrasi

Menurut Abdurrahman Assegaf perbincangan tentang demokrasi mencakup persoalan nilai, seperti nilai tentang hak bagi semua penduduk, nilai tentang kemerdekaan yang antara lain meliputi kebebasan pers kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi serta bertindak, nilai tentang keadilan dan yang lebih dari itu semua, demokrasi berciri pokok adanya kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, serta tanggung jawab atas pikiran dan perbuatannya sendiri.<sup>12</sup>

Menurut Heru Nugroho dalam Ngainun Naim & Ahmad Sauqi pendidikan bukan lagi kebudayaan yang beku (*frozen culture*) yang tidak mengalami perubahan dan anti kritik, tetapi merupakan budaya dinamis yang secara terus menerus dapat dikritik dan direvisi kearah yang lebih baik. Artinya dunia pendidikan harus selalu memperhatikan kebutuhan anak didik. Jika pendidikan mengabaikan kebutuhan anak didik dan memaksakan berjalan secara kaku, sebagaimana yang digariskan dalam kurikulum, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan pun belum tentu akan dapat dicapai.<sup>13</sup>

Dilihat dalam tinjauan Islam, menurut Syamsul Arif dan Ahmad Barizi suatu program pendidikan Islam dikatakan demokratis jika memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Tingginya komitmen keilmuan.
2. Menempatkan guru/dosen dan peserta didik/mahapeserta didik sebagai subjek pendidikan yang saling berintegrasi, saling mengisi, dan saling melengkapi.
3. Menempatkan pendidikan dan anak didik secara proporsional
4. Konsisten dengan prinsip belajar tuntas (*long life education*)
5. Tidak berhenti pada retorika dan teori, tetapi ada langkah-langkah konkret estafet dan pebgalaman ilmu.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>12</sup> Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004). Hlm. 192-193.

<sup>13</sup> Naim, *Pendidikan*, hlm. 64.

<sup>14</sup> Syamsul Arifin dan Ahmadi Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtlaf dalam Islam* (Malang: UMM Press dan PSIF, 2001), hlm. 138.

Pendidikan Islam demokratis merupakan prasyarat mutlak dalam konteks kehidupan global. Pendidikan Islam yang eksklusif dan anti demokrasi akan ditinggalkan oleh para peminatnya, karena kontraproduktif dengan realitas yang berkembang. Namun demikian, mewujudkan pendidikan khususnya pendidikan Islam, yang demokratis bukanlah hal yang mudah.<sup>15</sup>

Ada beragam tantangan yang harus dihadapi, menurut H.A.R Tilaar, ada lima tantangan dalam demokrasi pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. *Pertama*, pendidikan yang penuh kebohongan. *Kedua*, sistem pendidikan yang elitis. *Ketiga*, proses domestifikasi. *Keempat*, proses pembodohan. *Kelima*, budaya korporasi.<sup>16</sup> Tantangan-tantangan ini harus dihadapi jika ingin mewujudkan pendidikan yang demokratis. Antara pendidikan demokratis dan Islam pluralis-multikultural merupakan sebuah rangkaian. Masing-masing saling bergantung dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, penciptaan sistem pendidikan yang demokratis akan mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan Islam pluralis-multikultural.<sup>17</sup>

## 2. Nilai Toleransi

Toleransi adalah kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain.<sup>18</sup> Dalam literatur agama Islam, toleransi disebut dengan *tasamuh* yang dipahami sebagai sifat atau sikap menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian (pandangan) orang lain yang bertentangan dengan pandangan kita. Secara prinsip metodologis, toleransi adalah penerimaan terhadap yang tampak sampai kepalsuannya tersingkap.<sup>19</sup>

Toleransi relevan dengan epistemologi. Ia juga relevan dengan etika, yaitu sebagai prinsip menerima apa yang dikehendaki sampai ketidaklayakannya tersingkap, dan toleransi adalah keyakinan bahwa keanekaragaman agama terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya, baik kondisi, ruang, waktu, pransangka, keinginan, dan kepentingan yang berbeda antara satu agama dengan agama lainnya.<sup>20</sup>

Dengan tumbuhnya sikap saling memahami, saling mengerti dan saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, diharapkan dapat menjadi batu pijakan ke arah tercapainya kerukunan hidup antar umat beragama, dan juga masing-masing penganut agama akan memiliki komitmen yang kokoh terhadap agamanya masing-masing-masing. Sikap pluralis semacam inilah yang seharusnya

---

<sup>15</sup> Naim, *Pendidikan*, hlm. 72.

<sup>16</sup> Tilaar, *Mltikulturalisme*, hlm. 297-299.

<sup>17</sup> Naim, *Pendidikan*, hlm. 74.

<sup>18</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. III (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 41.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

ditumbuhkembangkan lewat berbagai macam institusi yang ada, termasuk lewat jalur pendidikan. dengan demikian, ke depan diharapkan agar lahir sebuah masyarakat yang pluralis, toleran, bermoral dan beradab.<sup>21</sup>

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memiliki perspektif yang konstruktif terhadap perdamaian dan kerukunan hidup. Dalam Al-Quran manusia digolongkan menjadi tiga golongan: kaum Muslim, *ahl al-Kitab*, dan golongan di luar Muslim dan *ahl al-Kitab*, yaitu golongan *watsany* (pagan). Menurut Al-Quran, semua golongan tersebut mempunyai tempat dan kedudukan tersendiri dalam hubungan sosial dengan umat Islam.<sup>22</sup>

Menurut beberapa pemikir besar seperti Fazlur Rahman dan Mahmoud M. Ayyoub dalam Naim mengatakan bahwa kasih sayang dan rahmat Allah adalah otoritas Allah sendiri. Tidak ada yang menjamin bahwa hanya kaum Muslimin saja yang akan memperolehnya. Sebab, ukuran untuk memperolehnya bukan semata-mata dari formalitas keberagamaan, tetapi lebih pada aspek-aspek substansial, terutama bagaimana menyelami makna-makna universal ajaran agama dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, relasi antara kaum Muslim dengan non-Muslim seharusnya tidak dibangun di atas landasan kecurigaan dan saling klaim kebenaran, tetapi dibangun dengan kerangka yang penuh toleransi, sehingga akan tercipta kehidupan yang damai. Tugas yang paling mendasar yang diusung masing-masing agama adalah bagaimana masing-masing pemeluk agama berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemungkaran.<sup>23</sup>

Dengan demikian, cara pandang yang toleran adalah hasil dari dialektika dan pengasahan kesadaran yang dilakukan secara terus-menerus. Bisa jadi kesadaran tersebut lahir karena dialektika yang berlangsung secara produktif dalam dinamika hidup yang panjang. Dalam konteks ini Farid Essack merefleksikan pengalamannya memiliki kesadaran pluralis melalui hasil persentuhan pengalaman hidupnya.

“The fact that our oppressions was made bearble by the solidarity, humanity and laughter of our Cristian neighbours made me suspicious of all religious ideas that claimed salvation only for their own imbued me with a deep awareness of the intrinsic worth of the religious other. How could i possibly look Mrs Batista and Aunty Katie in the eye while believing that, despite the kindness that shone from every dealing which they had with us, they were destined for the fire of hell? This acceptance of the other, the core of religious pluralism, did not come naturally however, to the township dweller”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Naim, *Pendidikan*, hlm. 83.

<sup>22</sup> Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun* (yogyakarta: Bentang, 2000), hlm. 8-9.

<sup>23</sup> Naim, *Pendidikan*, 105.

<sup>24</sup> Farid Essack, *Qur'an, Liberation & Pluralism, An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld, 1997), hlm. 3.

### 3. Nilai Hak Asasi Manusia

Kekerasan dipahami sebagai perbuatan yang melampaui batas perlakuan terhadap hak-hak seseorang, maka dapat dikatakan bahwa di mana terjadi kekerasan di situ terjadi pelanggaran HAM.<sup>25</sup> Semakin tinggi intensitas kekerasan semakin berat pula pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus-kasus yang ditemukan terdahulu terlihat bahwa hanya karena sebab-sebab sepele, kekerasan yang ditimbulkan bisa meledak dan menjadi bentuk kekerasan tingkat berat.

Dalam Islam, hak diperoleh setelah kewajiban *kifayah* (kolektif) dan kewajiban *'ain* (individual). Baik sebagai individu maupun kolektif, manusia memiliki kewajiban kepada Allah, yakni beribadah, disamping kewajiban-kewajiban lainnya, seperti kepada diri sendiri dan keluarga, tetangga, buruh, harta benda, dan negara. Begitu pula sebaliknya, kewajiban negara kepada rakyatnya, kepada lingkungan dan lain-lain.<sup>26</sup>

Wawasan HAM sangat mungkin diterapkan di sekolah secara sistemik dan simultan baik pada materi, metode, tujuan, kebijakan, proses maupun lainnya. Materi PAI berwawasan HAM bisa dimasukkan pada materi akidah (*tauhid*), misalnya sebab materi tersebut dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban manusia kepada tuhannya, hukum Islam (*Syariat*). Kajiannya membahas hubungan antar sesama manusia (*hablun min an-nas*) dalam wujud interaksi dan transaksi sosial (*muamalat*), serta memuat peribadatan kepada Allah (*ibadah hablun min Allah*). Di samping itu, bisa pula dimasukkan ke dalam masalah moralitas Islami (*akhlak*) sebab problem *akhlak* ini terkait dengan perilaku manusia. Ringkasnya seluruh materi pendidikan Islam merupakan wahana kondusif bagi penerapan nilai-nilai HAM. Meski demikian, nilai-nilai humanisme dari materi PAI tersebut akan menjadi kering tatkala tidak disampaikan dengan cara yang humanis pula, sebab *al-thariqah ahammu min al-maddah* atau metode lebih utama dari pada materi.<sup>27</sup>

Prinsip-prinsip kemanusiaan ini digunakan untuk membangun sikap inklusif dan pengakuan perbedaan, yaitu prinsip yang bisa memberikan kesempatan yang setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, suku maupun agama.<sup>28</sup> Dengan cara ini, umat Islam diyakini dapat membangun pandangan inklusif bahwa semua umat manusia memiliki derajat sama, baik Muslim, non-Muslim maupun perempuan dalam segala aspek kehidupannya, baik secara individual maupun kolektif. Dalam hal ini, manusia bukanlah sebagai alat,

---

<sup>25</sup> Assegaf, *Pendidikan*, hlm. 119.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 190.

<sup>28</sup> Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 140.

tetapi menjadi tujuan bagi dirinya.<sup>29</sup>

#### 4. Nilai Keadilan Sosial

Dalam Al-Quran digunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata yang berhubungan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonimnya juga dijumpai seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya dalam Al-Quran. Kata *'adl* dalam berbagai bentuknya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan pengertian keadilan, seperti kata *ta'dilu*, dalam arti mempersekutukan tuhan, dan *'adl* dalam arti tebusan.<sup>30</sup> Abdurrahman Wahid sendiri menjelaskan keadilan adalah:

“Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Quran dari akar kata *'adl* itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan (“Hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan”). Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata *'adl* dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak jelas betapa porsi “warna keadilan” mendapat tempat dalam Al-Quran, sehingga dapat dimengerti sikap kelompok Mu'tazilah dan Syi'ah untuk menempatkan keadilan (adalah) sebagai salah satu dari lima prinsip utama *al-Mabadi' al-Khamsah* dalam keyakinan atau akidah mereka.<sup>31</sup>

Apa yang dikemukakan KH Abdurrahman Wahid di atas dipertegas dengan pengertian dan dorongan Al-Quran agar setiap manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang diembannya, melindungi kaum lemah dan kekurangan, memiliki kepekaan sosial dengan sesama warga masyarakat dan jujur dalam bersikap. Perintah Allah untuk melakukan pemberdayaan terhadap sesamanya menunjukkan orientasi yang kuat mengenai akar keadilan dalam Al-Quran. Demikian juga wawasan keadilan tidak hanya dimaksudkan untuk memperhatikan ruang lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, tetapi juga lingkup makro kehidupan masyarakat. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslimin saja, tetapi juga mereka yang beragama lain. Hal itu juga tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka belaka, tetapi juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran

---

<sup>29</sup> Moh. Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An Naim* (Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 206.

<sup>30</sup> Abdurrahman Wahid, “Konsep-Konsep Keadilan”, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed) *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 98.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 99.



agama masing-masing.<sup>32</sup>

Fase terpenting dari keadilan dalam Al-Quran adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai pedoman etis atau dorongan moral saja. Implementasi keadilan adalah sebagai bagian penting dari pemenuhan kewajiban agama, namun kaum Muslim perlu waspada dengan kecenderungan ideologis yang tidak rasional karena tidak ada refleksi dalam menerima suatu ajaran agama. Di samping itu, kaum Muslim harus mampu menegakkan keadilan secara komprehensif, bukan hanya sekedar pengaturan parsial.<sup>33</sup> Dengan demikian keadilan tidak boleh hanya diukur dari segi lahirnya atau formalitas saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menegakkan keadilan secara substansial.<sup>34</sup>

## 5. Nilai Kesetaraan Gender

Gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan jenis kelamin.<sup>35</sup> Sebagai konsep dalam analisis sosial, gender mengacu pada seperangkat sifat peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai bentuk budaya.<sup>36</sup> Masyarakat menciptakan sikap dan perilaku berdasarkan jenis kelamin, termasuk menentukan apa yang seharusnya membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan tersebut diwariskan secara turun temurun melalui proses sosialisasi baik dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan agama.<sup>37</sup>

Gender juga dapat dipahami sebagai konsekuensi yang muncul akibat perbedaan anatomi biologis yang mendorong munculnya aspek-aspek kebudayaan.<sup>38</sup> Secara garis besar teori-teori gender dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, adalah kelompok teori-teori *nature* yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi laki-laki, dengan sederet perbedaannya dengan perempuan yang menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. Laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Organ reproduksi perempuan beserta fungsi yang diasosiasikan kepadanya seperti, hamil, melahirkan dan menyusui dianggap sebagai membatasi ruang gerak bagi perempuan. Batasan ini

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 100-101

<sup>34</sup> Dahlan, *Paradigma*, hlm. 138.

<sup>35</sup> Pamela Sue Anderson, *A Feminist Philosophy of Religion* (Blacwell: Blacwell Published, 1998), hlm. 6.

<sup>36</sup> Julia Claves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian silawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 1-7.

<sup>37</sup> Marhumah, "Konstruksi Gender dan Hegemoni Kekuasaan (Melacak Peran Perempuan Pada Pendidikan Pesantren)" dalam *Antologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2010), hlm. 185.

<sup>38</sup> *Ibid.*

tidak berlaku bagi laki-laki. Perbedaan inilah yang melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam teori ini adalah teori fungsional struktural, teori sosio-biologis dan psikoanalisa.<sup>39</sup>

*Kedua*, adalah kelompok teori-teori *nature* yang melihat bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial-budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pandangan ini didukung oleh teori-teori konflik dan teori-teori feminis.<sup>40</sup>

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang strategis dalam menransformasikan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Demikian pula budaya yang berbias gender dapat berkembang dan tetap ada, tidak lepas dari proses pendidikan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga munculnya perbedaan gender di masyarakat merupakan estafet dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui proses pendidikan yang tidak berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender.<sup>41</sup>

Pendidikan selain berfungsi untuk menurunkan atau mentransformasi budaya dari satu generasi berikutnya, juga mempunyai fungsi untuk mengubah perilaku kearah yang lebih baik, fungsi inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mendekonstruksi pandangan-pandangan yang tidak mendukung semangat kesetaraan dan keadilan gender. Untuk menumbuhkan generasi yang sadar akan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pendidikan formal di sekolah adalah jangan sampai guru atau pendidik berpikir mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dilakukan peserta didik laki-laki dan perempuan, keduanya harus diberi akses yang sama, dan berpikir bahwa keduanya adalah potensi sumber daya manusia yang sama. Reformasi terhadap konsep, sistem dan praksis pendidikan formal yang paham gender sangat diperlukan, sehingga pendidikan dapat digunakan untuk mengubah persepsi yang kurang benar terhadap sumber daya perempuan dan sumber daya laki-laki.<sup>42</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Multikulturalisme dalam pendidikan dasar Islam adalah sebuah keharusan yang mesti dijalankan oleh semua pihak yang merasa berada dalam lingkup pendidikan, dalam isi pembelajaran dan materi ajar di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah seyogyanya memuat konten multikulturalisme ini baik secara

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 186-187.

<sup>41</sup> Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), hlm. 262.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 263.

langsung dalam proses pembelajaran maupun secara tidak langsung dalam lingkup sekolah atau madrasah. Pengenalan konsep sejak dini tentu sangat penting karena penanaman nilai-nilai multikulturalisme melalui internalisasi akan mampu diaktualisasikan dan menjadi kebiasaan yang baik bagi siswa sekolah sehingga tujuan akhirnya adalah siswa mampu mengamalkan kedalam kehidupan sehari-hari mereka tentang nilai-nilai luhur yang ada dalam multikulturalisme itu sendiri, seperti keadilan, toleransi, menghargai hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

### Daftar Pustaka

- Anderson, Pamela Sue, *A Feminist Philosophy of Religion* (Blacwell: Blacwell Published, 1998)
- Angwarmase, Aris, "Mencarai Landasar Pluralisme," dalam *Prospek Pluralisme Agama* (Yogyakarta: Interfidie, 2009)
- Arifin, Syamsul dan Ahmadi Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtlaf dalam Islam* (Malang: UMM Press dan PSIF, 2001)
- Assegaf, Abdurrahman, *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004)
- Dahlan, Moh., *Epistemologi Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An Naim* (Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013)
- Essack, Farid, *Qur'an, Liberation & Pluralism, An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld, 1997)
- Karim, Abdul, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Surya Raya, 2004)
- Maksum, Ali, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011)
- Marhumah, "Konstruksi Gender dan Hegemoni Kekuasaan (Melacak Peran Perempuan Pada Pendidikan Pesantren)" dalam *Antologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2010)
- Mosse, Julia Claves, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian silawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun* (yogyakarta: Bentang, 2000)

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. III (Bandung: Mizan, 1998)

Sirait, Sangkot, "Landasan Normatif Pendidikan Islam Multikultural", dalam *Antologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2010)

Wahid, Abdurrahman, "Konsep-Konsep Keadilan", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed) *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995)

Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000)